

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Benardi, dkk (2009) menyatakan hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) mempekerjakan individu lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama *principal* tersebut. Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya.

Kontrak kerja yang dimaksud adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan. Hubungan keagenan mewajibkan agen memberikan laporan periodik pada *principal* tentang usaha yang dijalankan dan *principal* akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, dalam hubungan keagenan tersebut, laporan keuangan merupakan sarana transparansi dan akuntabilitas manajemen (agen) kepada pemiliknya (prinsipal). Secara empiris banyak studi yang telah menguji bahwa pengungkapan laporan keuangan perusahaan dilakukan untuk mengendalikan konflik kepentingan antara pemegang saham, kreditur, dan manajemen (Chow dan Boren, 1987 dalam Benardi, dkk, 2009). Pandangan ini menunjukkan bahwa

pengungkapan laporan keuangan erat kaitannya dengan hubungan keagenan antara manajemen dan pemilik serta antara pemilik dengan kreditur.

2. Pengungkapan Informasi (*Disclosure*)

a. *Disclosure* dalam Laporan Keuangan.

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai.

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* Nomor 1, dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur, dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis yang rasional. Informasi tersebut harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai wawasan bisnis dan ekonomi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dapat dipahami dan tidak menjadikan salah intepretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan *disclosure* yang cukup (*adequate disclosure*)

artinya informasi yang disajikan tidak berlebihan namun juga tidak kurang sehingga tidak menyesatkan orang yang membacanya.

Menurut Hendriksen (1992) dalam Prayogi (2003) ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu:

1) *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup)

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2) *Fair disclosure* (pengungkapan wajar)

Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

3) *Full disclosure* (pengungkapan penuh)

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan. Scott (1997: 92) dalam Subroto (2003) dalam Benardi (2009) menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh (*full disclosure*) yang dapat dicapai secara simultan. Pertama, pengungkapan memungkinkan investor membuat keputusan investasi lebih baik, dan kedua, pengungkapan meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif. Pengungkapan tidak saja penting pada masa sekarang, tetapi akan menjadi semakin penting pada masa mendatang.

Menurut Rahayu (2008) terdapat dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu:

1) Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan tentang standar pengungkapan informasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik yaitu, Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Peraturan tersebut diperkuat dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/1995, selanjutnya diubah melalui Keputusan Ketua Bapepem No. Kep-38/PM/1996 yang berlaku bagi semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik.

Peraturan tersebut diperbaharui dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk setiap jenis industri.

2) Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Sedangkan dari sumber PSAK dapat disimpulkan bahwa informasi lain atau informasi tambahan (telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik

utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, kondisi ketidakpastian, laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah) adalah merupakan pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan diperlukan dalam rangka memberikan penyajian yang wajar dan relevan dengan kebutuhan pemakai.

Luas pengungkapan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial budaya suatu negara, teknologi informasi, kepemilikan perusahaan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

b. Pengukuran Luas Pengungkapan

Pengukuran luas pengungkapan yaitu dengan menggunakan indeks pengungkapan. Indeks pengungkapan diperoleh melalui pemberian skor pada setiap butir-butir yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Subiyantoro (1996) indeks pengungkapan merupakan hasil pembagian antara skor pengungkapan yang telah diraih dengan total nilai maksimum yang mungkin diraih. Butir pengungkapan laporan keuangan yang diukur meliputi yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*). Dalam melakukan perhitungan indeks, peneliti menggunakan cara yang digunakan oleh Subiyantoro (1996) dalam Irawan (2006) di mana item-item informasi yang digunakan mencakup *mandatory* dan *voluntary disclosure*.

3. Karakteristik Perusahaan

Penelitian pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan telah banyak dilakukan. Di negara maju penelitian mengenai luas pengungkapan

(*Disclosure*) terhadap karakteristik perusahaan diantaranya: Singvi dan Desai (1971) dalam Benardi, dkk (2009) melakukan penelitian pengaruh karakteristik perusahaan yaitu: besar perusahaan, jumlah pemegang saham, tingkat kembalian, margin laba, status pendaftaran, dan KAP yang mengaudit terhadap kualitas ungkapan. Buzby (1975) dalam Marwata (2001) yang meneliti luas ungkapan yang berpengaruh terhadap karakteristik perusahaan yang yaitu: status pendaftaran dan besar aktiva perusahaan. Botosan, (1997) dalam Fitriyani (2001) yang meneliti hubungan antara tingkat pengungkapan dengan biaya ekuitas dan ukuran perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan juga dilakukan di dalam negeri. Marwata (2001) meneliti hubungan karakteristik perusahaan yang terdiri dari likuiditas, rasio ungkitan, basis perusahaan, umur perusahaan, penerbitan sekuritas dan struktur kepemilikan terhadap luas ungkapan. Benardi, dkk (2009) meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi luas pengungkapan diantaranya adalah: Ukuran perusahaan, porsi kepemilikan saham, leverage, likuiditas, profitabilitas, ukuran KAP dan skope bisnis.

Menurut Wallace *et al.* (1994) dalam Benardi, dkk (2009) karakteristik perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori. *Pertama*, karakteristik yang berhubungan dengan struktur perusahaan. *Kedua*, karakteristik yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. *Ketiga*, karakteristik yang berhubungan dengan pasar perusahaan. Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan yang digunakan meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, porsi kepemilikan saham publik, likuiditas, profitabilitas, ukuran KAP (Auditor), basis perusahaan dan skope bisnis.

4. Asimetri Informasi

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

- a. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin

dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

- b. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Diamond and Verrecchia (1991) dalam Benardi dkk (2009) menyatakan asimetri informasi bisa berkurang bila perusahaan melaksanakan kebijakan pengungkapan yang luas (*extent disclosure*). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Botosan (1997) bahwa semakin komprehensif atau tinggi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan maka akan memperkecil asimetri informasi.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Ukuran Perusahaan dan Luas pengungkapan

Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa penjelasan mengenai hal tersebut, Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976).

Perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Perusahaan

besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum. Mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan menghindari risiko.

Penjelasan lain juga sering diajukan adalah karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar, dengan sumber daya yang besar tersebut perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih banyak seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar.

Lang dan Lundholm (1993) dalam Benardi, dkk, (2009) menyatakan bahwa tingkat keluasan informasi dalam kebijakan pengungkapan perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik (*public demand*) akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil.

Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil dari penelitian yang dilakukan Benardi (2009) berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan keuangan. Hal yang sama diungkapkan oleh Fitiyani (2001) dan Almilia (2007) yang menemukan bahwa

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan

2. Tingkat Leverage dan Luas pengungkapan

Rasio *leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang (Prastowo dan Juliaty, 2002 dalam Almilia, 2007). Bagi para kreditur laporan tentang solvabilitas, digunakan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan akan dapat membayar hutang-hutangnya, jika perusahaan jatuh bangkrut. Berdasarkan alasan tersebut diharapkan perusahaan yang *debt rasionya* tinggi cenderung akan lebih luas dalam melakukan *disclosure* laporan keuangannya (Wallace, 1994 dalam Prayogi, 2003).

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menanggung biaya keagenan (*agency cost*) yang tinggi. Untuk mengurangi biaya keagenan (biaya monitoring) manajer akan memberikan pengungkapan yang lebih luas (komprehensif) guna meyakinkan kreditur (Aljifri dan Hussainey, 2006). Hal ini dikarenakan perusahaan yang tumbuh besar memiliki kewajiban yang lebih besar dalam memuaskan kebutuhan krediturnya terhadap informasi dengan cara memberikan pengungkapan secara lebih terperinci pada laporan tahunannya. Schipper, 1981 dalam Marwata, 2001 menyatakan

bahwa tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ainun dan fuad (2000) dalam Irawan (2006) berhasil membuktikan bahwa bahwa leverage keuangan memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap indeks kelengkapan, bertentangan dengan yang diungkapkan oleh Benardi, dkk (2009) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara struktur modal (*leverage*) terhadap luas pengungkapan. Atas dasar teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis dikembangkan sebagai berikut:

H₂: Tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan.

3. Porsi Kepemilikan Saham Publik dan Luas Pengungkapan

Secara empiris banyak studi yang telah menguji bahwa pengungkapan laporan keuangan perusahaan dilakukan untuk mengendalikan konflik kepentingan antara pemegang saham, kreditur, dan manajemen (Chow dan Boren, 1987 dalam Benardi, dkk, 2009). Terdapat potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik dalam hal luasnya pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan. Sebagai pihak yang tidak mengikuti operasi perusahaan sehari-hari pemilik menginginkan pengungkapan informasi yang seluas-luasnya (Prayogi, 2003).

Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik ditentukan dengan prosentasi kepemilikan saham yang dimiliki pihak publik. Pengertian pihak publik

disini adalah pihak individu yang berada diluar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin besar tekanan yang dihadapi perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan dengan semakin besar jumlah saham yang dimiliki masyarakat maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga semakin banyak pula butir-butir informasi yang mendetail yang dituntut untuk dibuka dalam laporan tahunan (Prayogi, 2003)

Penelitian yang dilakukan Benardi, dkk (2009) menemukan bahwa porsi kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2001) yang menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap ungkapan sukarela, hal tersebut diperkuat oleh Simanjuntak dan Widiastuti (2004) dalam Irawan (2006) bahwa porsi saham publik (PUB) berpengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahunan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

H₃: Porsi kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan.

4. Likuiditas Perusahaan dan Luas pengungkapan

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur jangka pendek (Prastowo dan Juliaty, 2002 dalam Almilialia, 2007). Keadaan yang kurang likuid

kemungkinan akan menyebabkan perusahaan tidak bisa melunasi hutang jangka pendeknya pada tanggal jatuh temponya. Dalam posisi demikian kadang-kadang perusahaan terpaksa menarik pinjaman baru dengan tingkat bunga yang relatif tinggi, menjual investasi jangka panjang atau aktiva tetapnya untuk melunasi hutang jangka pendek tersebut. Jika keadaan tidak (kurang) likuid demikian serius hal ini akan cenderung untuk menuju kebangkrutan (Prayogi, 2003).

Cooke (1989) dalam Marwata (2001) menjelaskan bahwa tingkat likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Disatu sisi, tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel. Wallace *et al.*, (1994) dalam Fitriani (2001) menyatakan bahwa likuiditas dapat juga dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Dari sisi ini, perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih komprehensif untuk menunjukkan pencapaian kinerja manajemen yang efektif.

Penelitian tentang Pengaruh antara rasio likuiditas dengan luas pengungkapan telah dikemukakan oleh Wallace *et al.*, (1994) dalam Fitriyani (2001). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio likuiditas mempunyai pengaruh positif dengan luas pengungkapan. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan

5. Profitabilitas Perusahaan dan Luas pengungkapan

Profitabilitas adalah Kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha perusahaan selama satu tahun. Singvi dan Desai (1971) dalam Benardi, dkk (2009) mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab manajer ingin menyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan para investor kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dengan harapan perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi pula.

Didasarkan dengan tujuan untuk menarik investor, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memberikan signal melalui pengungkapan laporan keuangan yang lebih detail mengenai kondisi perusahaan. Hasil yang ditemukan oleh Almilia (2007) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diprosikan dengan *net profit margin* (NPM) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kelengkapan pengungkapan (wajib dan sukarela).

Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2001) dan juga Simanjuntak dan Widiastuti (2004) bahwa *net profit margin* yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terperinci. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis keenam dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

H₅: Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan.

6. Basis Perusahaan dan Luas Pengungkapan

Afiliasi dapat diartikan sebagai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama hubungan; hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Menurut Susanto (1992) dalam Fitriyani (2001), afiliasi perusahaan dengan perusahaan asing (multinasional) mungkin akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. Terdapat beberapa alasan mengenai dugaan ini. Pertama, perusahaan berbasis asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya diluar negeri. Kedua, perusahaan berbasis asing mungkin mempunyai sistem informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan juga terdapat permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, analisis dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Fitriani (2001) perusahaan-perusahaan dengan status yang berbeda akan memiliki stakeholders yang berbeda, sehingga tingkat kelengkapan pengungkapan yang harus dilakukan berbeda. Perusahaan dengan status PMA akan memberikan pengungkapan yang lebih luas dibanding perusahaan domestik. Hasil penelitian Susanto (1994) dalam Fitriani (2001) menunjukkan bahwa luas ungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan adalah lebih besar untuk

perusahaan berbasis asing (PMA). Hal ini bertentangan dengan yang diungkapkan oleh Suropto (1999) dalam Prayogi (2003). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keempat dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

H₆: Basis perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan

7. Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Luas Pengungkapan

Pengukuran variabel pasar banyak tertuju pada aspek perilaku perusahaan yang timbul sebagai akibat keikutsertaannya sebagai anggota kelompok kerjasama antara lingkungan perusahaan dalam lingkungan operasionalnya. Perilaku sebuah perusahaan mungkin tidak sesuai dengan yang termuat dalam sebuah indeks kelengkapan pengungkapan, jika perusahaan tidak bergabung dengan suatu kelompok yang menghasilkan *market culture* tertentu (Subiyantoro, 2006 dalam Benardi, dkk, 2009).

Ukuran kantor akuntan publik sangat berpengaruh terhadap jumlah informasi yang diungkapkan pada laporan keuangan. Secara umum, kantor akuntan publik memperhatikan standar minimal yang ditentukan. Salah satu bentuk standar minimal tersebut adalah bahwa pengungkapan yang informatif pada laporan keuangan harus memperhatikan unsur memadai dan logis (beralasan) pada laporan auditnya. Adapun unsur yang memadai dan logis tersebut sangat tergantung pada pertimbangan individual kantor akuntan publik, sehingga pengungkapan informatif memadai dan logis tersebut akan berbeda diantara kantor akuntan publik (Tjakradinata, 2000). Menurut Benardi (2009) kualitas auditor antara KAP berukuran besar dan KAP berukuran kecil memiliki

perbedaan dari segi sumber daya dan teknologi yang dapat memengaruhi hasil kerja (kualitas) auditnya.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Becker *et al.* (1998) dalam Benardi, dkk (2009) ditemukan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran besar akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas berdasarkan regulasi yang telah ditentukan, karena memiliki kualitas, reputasi dan kredibilitas dibanding KAP ukuran kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2001) menemukan bahwa KAP signifikan dalam memengaruhi luas pengungkapan atas laporan keuangan. Perusahaan yang menggunakan kantor akuntan publik HTM dan PUCO mempunyai IKP sukarela yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menggunakan kantor akuntan publik lainnya. Benardi, dkk (2009) juga menemukan bahwa variabel kualitas KAP berpengaruh positif terhadap variasi luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis ketujuh dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

H₇: Ukuran KAP (auditor) berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan

8. Skope Bisnis dan Luas pengungkapan

Cooke (1991) dalam Benardi, dkk (2009) membuktikan bahwa pengungkapan yang dilakukan perusahaan dagang tidak seluas perusahaan yang dilakukan perusahaan non dagang, sedangkan perusahaan manufaktur melakukan pengungkapan yang lebih luas dibanding dengan perusahaan non pemanufakturan,

tetapi belum ada teori definitif yang menjelaskan bahwa industri tertentu melakukan pengungkapan yang lebih komprehensif dibanding industri lainnya.

Secara analogi Wallace dan Naser (1995) dalam Benardi, dkk (2009) memperkirakan perusahaan konglomerat memiliki cakupan bisnis yang lebih luas dibanding dengan perusahaan non konglomerat. Menurut Arviana (2009), perusahaan konglomerasi merupakan perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi tidak mempunyai keterkaitan operasi. Akuisisi perusahaan yang menghasilkan *foodproducts* oleh perusahaan komputer dapat dikatakan sebagai akuisisi konglomerat. Berdasarkan definisi tersebut perusahaan konglomerat akan memberikan informasi dan membuat pengungkapan yang lebih luas kepada publik sesuai dengan peraturan yang ada karena memiliki cakupan usaha yang lebih luas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Benardi, dkk (2009) bahwa skope bisnis berpengaruh terhadap variasi luas pengungkapan perusahaan, yang berarti bahwa perusahaan konglomerat memiliki cakupan bisnis lebih luas dan memberikan informasi yang lebih luas kepada publik dibandingkan perusahaan non konglomerat. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedelapan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

H₈: Skope bisnis berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan laporan tahunan

9. Luas Pengungkapan dan Asimetri Informasi

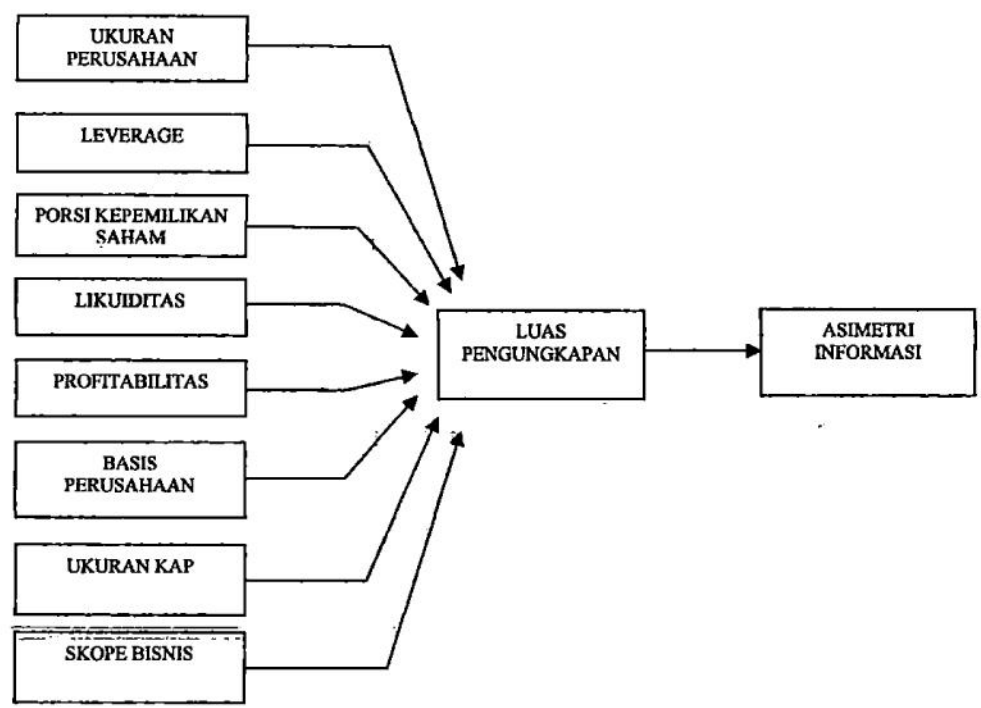
Dasar perlunya praktik pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Dalam praktiknya masalah keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham, kreditor dan manajer (Richardson, 2000 dalam Benardi, 2009).

Konflik tersebut muncul karena para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat pengetahuannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal yang hanya mengetahui informasi akuntansi melalui laporan keuangan perusahaan. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Botosan (1997) serta Bloomfield dan Wilks (2000) dalam Benardi (2009) bahwa semakin komprehensif atau tinggi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan maka akan memperkecil asimetri informasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh Benardi (2009) bahwa luas pengungkapan berpengaruh signifikan terhadap variasi asimetri informasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan maka semakin kecil asimetri informasi yang terjadi antara perusahaan dan investor. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis berikutnya dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

H₉: Luas pengungkapan laporan tahunan berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi

C. Model Penelitian



Gambar 3.1